



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD FIRDAUS
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, **6 Februari** 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ACHMAD FIRDAUS
NIP 196405121987031004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Achmad Firdaus
 NIP : 196405121987031004
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Terwujudnya masyarakat yang bugar dan meningkatnya kualitas generasi muda	1	Indeks Pembangunan Olahraga	e-SAKIP	Definisi: Indeks Pembangunan Olahraga adalah Indeks gabungan yang mencerminkan capaian pembangunan olahraga berdasarkan sembilan dimensi, yakni : SDM Olahraga, Ruang Terbuka, Literasi fisik, Partisipasi, Kebugaran, Kesehatan, Perkembangan Personal, Ekonomi dan Performa. Metode Pengukuran : IPO = Hasil rata-rata capaian 9 dimensi Sumber data KEMENPORA RI	N/A	N/A	N/A	0.3	0.3	nilai
		2	Indeks Pembangunan Pemuda	e-SAKIP	Definisi: Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang kepemudaan dengan menggunakan 5 domain, yaitu Pendidikan, Kesejahteraan dan Kesehatan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi. Metode Pengukuran: IPP = Hasil rata-rata capaian 5 dimensi Sumber Data: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	N/A	N/A	N/A	47.54	47.54	nilai

2	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	1	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	e-SAKIP	<p>Definisi: Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga adalah aktifitas fisik masyarakat dengan memperhatikan prinsip latihan yang terdiri dari Frekuensi (seberapa sering seseorang melakukan aktifitas fisik dalam seminggu) , Intensitas (seberapa keras seseorang melakukan aktifitas fisik) dan Durasi (Waktu melakukan aktifitas fisik).</p> <p>Metode Pengukuran: esponden ditanyakan apakah dalam satu minggu terakhir responden melakukan aktifitas fisik 3 kali atau lebih dalam satu minggu.</p> <p>Sumber Data: KEMENPORA RI</p>	N/A	N/A	N/A	8.92%	8.92%	Persen
3	Meningkatnya kualitas generasi muda	1	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	e-SAKIP	<p>Definisi: Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan baik yang diselenggarakan dengan APBD, dana Dekon dan Dana Hibah .</p> <p>Metode Pengukuran: Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dihitung dari : Persentase Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan terhadap jumlah pemuda DKI Jakarta x 100%</p> <p>Sumber Data: Pengukuran Sendiri</p>	N/A	N/A	N/A	0.88%	0.88%	Persen
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen

				<p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$ 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $\leq 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $\leq 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p>							
5	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
6	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional Nomor (10)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional Nomor (10)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Nomor (14)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		1	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS											
8	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	1	Prestasi POMNAS (Juara umum POMNAS)	e-SAKIP	Cara menghitung: jumlah peserta POMNAS sebanyak 34 provinsi. Juara Umum = $34/34 \times 100\%$ Juara 2 = $33/34 \times 100\%$, Juara 3 = $32/34 \times 100\%$, dan seterusnya	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Prestasi
9	Meningkatnya Pemberdayaan dan peningkatan peran pemuda dan pramuka	1	Prestasi pemuda pelopor tingkat nasional (Juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional)	e-SAKIP	Cara menghitung: jumlah peserta Pemuda Pelopor sebanyak 34 provinsi. Juara 1 = $34/34 \times 100\%$ Juara 2 = $33/34 \times 100\%$, dan seterusnya	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Prestasi

10	Meningkatnya kebugaran jasmani masyarakat disabilitas dibawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (NPC,SOINA, PORTURIN)	1	Presentase Peningkatan kebugaran jasmani masyarakat disabilitas dibawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (NPC,SOINA, PORTURIN)	e-Kinerja	Cara menghitung : jumlah masyarakat disabilitas dibawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga (NPC,SOINA, PORTURIN) sebanyak 615 atlet. Jumlah masyarakat Disabilitas yang bugar/jumlah masyarakat disabilitas *100%	N/A	50%	N/A	100%	100%	Persen
11	Tersedianya Platform Kolaborasi yang fleksibel dan dapat memfasilitasi beragam kolaborasi	1	Jumlah kolaborator Jakarta	e-Kinerja	Jumlah kolaborator yang aktif pada tahun 2022 dan terekam melalui platform kolaborasi, baik dalam bentuk PKS maupun non PKS (bukan bersifat partisipasi)	N/A	N/A	N/A	20	20	Kolaborator
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam . d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat

16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	<p>Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30</p> <p>Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB</p>	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
17	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase
SASARAN OPERASIONAL											
19	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	(Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	(Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat / Jumlah TL Aduan Masyarakat) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
21	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Jakarta, 6 Februari 2022

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi DKI Jakarta,


Achmad Firdaus
NIP 196405121987031004